

Kesenjangan Pendapatan sebagai Determinan Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif

Riza Indriani¹, Agil Badawi², Agung Kurniawan B. Marpaung³, Bonansa Situmorang⁴, Cindy B. Sitanggang⁵, Cristine Natasia Sihalo⁶, Dhea Ananda Pinem⁷

Universitas Negeri Medan, Indonesia

agilbadawi88@gmail.com², marpaungagung6@gmail.com³, bonansasitumorang3@gmail.com⁴, sitanggangcindy37@gmail.com⁵, cristinenatasia@gmail.com⁶, dheapinem98@gmail.com⁷
E-mail Korespondensi : rizaindriani@unimed.ac.id

Submitted: 04th April 2026 | **Edited:** 30th April 2026 | **Issued:** 01st July 2026

Cited on: Indriani, R., Badawi, A., Marpaung, A. K. B., Situmorang, B., Sitanggang, C. B., Sihalo, C. N., & Pinem, D. A. (2026). Kesenjangan Pendapatan sebagai Determinan Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 9(3), 930-938.

ABSTRACT

Income inequality remains a persistent structural issue that weakens the effectiveness of poverty reduction in Indonesia, despite sustained economic growth. This study aims to examine the relationship between income inequality and poverty, identify key mediating factors, and analyze them within the framework of inclusive economic development. A qualitative literature review approach was applied using systematically selected secondary data from academic journals, books, and official reports published between 2010 and 2025. The selection of literature was based on relevance, credibility, and recency. The analysis employed content analysis to synthesize findings and identify consistent patterns across studies. The results show that income inequality significantly contributes to poverty persistence by limiting access to education, formal employment, productive assets, and basic services. Structural factors such as regional disparities, labor market dualism, and unequal resource distribution further reinforce this relationship. In addition, inequality reduces the effectiveness of economic growth in lowering poverty and increases the risk of intergenerational poverty. The study emphasizes that inclusive economic development through equitable access, improved human capital, and targeted social policies is essential to reduce inequality and poverty in a sustainable.

Keywords: Income Inequality, Poverty, Inclusive Development, Indonesia, Inequality

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan dua persoalan utama yang hingga saat ini masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir, distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan paradoks pembangunan, di mana peningkatan output ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan secara

merata. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi (Putri & Wahyudi, 2022; Karimi et al., 2023). Dengan demikian, persoalan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi dalam suatu perekonomian.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup tinggi. Selain itu, Rasio Gini yang relatif stagnan mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu, sehingga kelompok berpendapatan rendah belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Beberapa studi menegaskan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat menghambat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan karena terbatasnya akses kelompok miskin terhadap sumber daya ekonomi (Hutajulu et al., 2021; Nasution, 2020).

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi pembangunan, dan sebagian besar menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kedua variabel tersebut. Ketimpangan pendapatan tidak hanya menjadi akibat dari proses pembangunan yang tidak merata, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memperkuat kemiskinan secara berkelanjutan. Kondisi ini terjadi karena kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja yang produktif. Akibatnya, mereka sulit meningkatkan kapasitas ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kemiskinan (Aisyah et al., 2023; Jewaru & Siagian, 2022).

Selain faktor distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antarwilayah juga menjadi salah satu karakteristik utama perekonomian Indonesia. Konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, menyebabkan perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antar daerah semakin melebar. Daerah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan investasi cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lebih maju. Kondisi ini tidak hanya memperkuat ketimpangan ekonomi, tetapi juga membatasi mobilitas sosial masyarakat di daerah tertinggal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa disparitas wilayah memiliki kontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia (Irawan & Sulisty, 2022; Badriah, 2019).

Dalam perspektif teoritis, hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan ekonomi pembangunan, salah satunya adalah hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun pada tahap selanjutnya. Namun, dalam praktiknya, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mencapai fase penurunan ketimpangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu menciptakan pemerataan secara otomatis, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Beberapa studi menunjukkan bahwa tanpa kebijakan redistribusi yang efektif, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan pendapatan (Karimi et al., 2023; Putri & Wahyudi, 2022).

Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi inklusif menjadi semakin relevan untuk menjawab permasalahan kesenjangan dan kemiskinan. Pembangunan inklusif menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat pembangunan secara lebih adil dan berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis pada prinsip inklusivitas mampu meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan secara simultan (Dartanto et al., 2020).

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, sebagian besar studi masih berfokus pada pendekatan kuantitatif atau analisis parsial terhadap variabel tertentu. Kajian yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif, khususnya dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian literatur yang mampu mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih terstruktur dan komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kesenjangan pendapatan sebagai determinan kemiskinan di Indonesia serta menganalisisnya dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya dalam memahami keterkaitan antara ketimpangan dan kemiskinan, serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang layak. Dalam pendekatan kontemporer, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus keterbatasan dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi (Suryahadi, Al Izzati, & Suryadarma, 2020; Pratama & Wibowo, 2021). Pendekatan ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya melalui indikator moneter, melainkan harus dilihat secara lebih luas sebagai bentuk deprivasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan modern tidak hanya menggunakan pendekatan garis kemiskinan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi non-moneter seperti kualitas hidup dan akses terhadap layanan dasar (Yusuf & Sumner, 2021).

Di sisi lain, kesenjangan pendapatan mencerminkan ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan di antara kelompok masyarakat. Ketimpangan ini umumnya diukur menggunakan koefisien Gini, yang menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan menyimpang dari kondisi pemerataan sempurna. Dalam konteks negara berkembang, ketimpangan sering kali dipengaruhi oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, kepemilikan aset, serta struktur pasar tenaga kerja yang tidak seimbang (Setiawan & Rizal, 2022; Maulana, 2020). Ketimpangan yang tinggi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan menurunkan efektivitas kebijakan pembangunan.

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah menjadi fokus utama dalam berbagai kajian ekonomi pembangunan. Secara teoritis, ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memperbesar jumlah penduduk miskin karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata. Penelitian empiris menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih besar, terutama ketika akses terhadap pendidikan dan pekerjaan formal terbatas (Rahman & Hidayat, 2021; Kurniawati & Sari, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hanya sebagai hasil dari pembangunan yang tidak merata, tetapi juga sebagai faktor yang memperkuat kemiskinan secara struktural.

Selain itu, mekanisme hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa jalur utama. Pertama, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan kelompok berpendapatan rendah sulit meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya. Kedua, ketimpangan dalam kepemilikan aset menghambat kemampuan masyarakat miskin untuk mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan. Ketiga, struktur pasar tenaga kerja yang dualistik, yaitu dominasi sektor informal dengan produktivitas rendah, turut memperbesar kesenjangan pendapatan (Wicaksono & Amir, 2020; Firmansyah, 2021). Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang dikenal sebagai perangkap kemiskinan, di mana individu atau kelompok sulit keluar dari kondisi kemiskinan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka teoritis yang lebih luas, pembangunan ekonomi inklusif muncul sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya pemerataan dalam proses pembangunan. Pembangunan inklusif tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat yang adil serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa akses terhadap peluang ekonomi harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Sari & Nugroho, 2023; Purnomo, 2022). Dengan demikian, pembangunan inklusif berupaya mengatasi keterbatasan pendekatan pertumbuhan ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan aspek pemerataan.

Lebih lanjut, pembangunan inklusif juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem perlindungan sosial. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang bersifat inklusif, seperti bantuan sosial yang terarah dan program pemberdayaan ekonomi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Nugraha & Putri, 2021; Lestari, 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan dua fenomena yang saling terkait dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Ketimpangan yang tinggi tidak hanya mencerminkan ketidakmerataan distribusi pendapatan, tetapi juga memperkuat kemiskinan melalui keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi inklusif menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang disusun secara sistematis untuk mengkaji hubungan antara kesenjangan pendapatan

dan kemiskinan dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial ekonomi yang kompleks melalui sintesis berbagai temuan empiris dan konseptual dari penelitian terdahulu (Snyder, 2019). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada beberapa basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi, dengan menggunakan kata kunci yang relevan, antara lain “kesenjangan pendapatan”, “kemiskinan”, dan “pembangunan inklusif”.

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: (1) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada rentang tahun 2019 hingga 2025, (2) memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, (3) berasal dari jurnal ilmiah atau laporan resmi yang kredibel, serta (4) memuat analisis empiris atau konseptual terkait ketimpangan dan kemiskinan. Sementara itu, literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut, seperti sumber yang tidak terverifikasi atau tidak memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian, dikeluarkan dari proses analisis. Melalui tahapan ini, diperoleh sejumlah literatur yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan penelitian yang ada.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan-temuan utama dari berbagai sumber, membandingkan hasil penelitian, serta mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan dalam temuan empiris yang ada (Elo et al., 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sintesis yang lebih terstruktur dan kritis, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

Selain itu, untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan proses triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi, serta publikasi akademik lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Munn et al., 2020). Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan informasi, tetapi juga untuk membangun kerangka analisis yang sistematis dalam memahami keterkaitan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat struktural. Ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memperkuat keberlanjutan kemiskinan. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk miskin, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan kesempatan kerja formal (Aisyah et al., 2023; Rahman & Hidayat, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, sehingga kelompok berpendapatan rendah tidak memperoleh dampak yang signifikan dari peningkatan aktivitas ekonomi.

Salah satu faktor utama yang mendorong kesenjangan pendapatan di Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan. Literatur menunjukkan bahwa individu

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik, sementara kelompok dengan pendidikan rendah cenderung terjebak dalam sektor informal dengan produktivitas rendah. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Pratama dan Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa kesenjangan akses pendidikan berkontribusi langsung terhadap perbedaan tingkat pendapatan antar individu. Selain itu, keterbatasan akses pendidikan di daerah perdesaan dan wilayah tertinggal memperbesar disparitas kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Selain faktor pendidikan, struktur pasar tenaga kerja juga berperan penting dalam membentuk kesenjangan pendapatan. Dominasi sektor informal di Indonesia menyebabkan sebagian besar tenaga kerja tidak memiliki perlindungan sosial dan menerima pendapatan yang tidak stabil. Penelitian Wicaksono dan Amir (2020) menunjukkan bahwa dualisme pasar tenaga kerja antara sektor formal dan informal menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan temuan Firmansyah (2021) yang menegaskan bahwa pekerja di sektor informal cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan sektor formal, sehingga memperbesar kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Kesenjangan dalam penguasaan aset dan modal juga menjadi faktor struktural yang memperkuat ketimpangan pendapatan. Kelompok masyarakat yang memiliki aset produktif, seperti lahan atau modal usaha, memiliki kemampuan lebih besar untuk menghasilkan pendapatan tambahan, sementara kelompok tanpa aset hanya bergantung pada upah tenaga kerja. Penelitian Setiawan dan Rizal (2022) menunjukkan bahwa distribusi kepemilikan aset yang tidak merata berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketimpangan ini bersifat jangka panjang karena cenderung diwariskan antar generasi, sehingga memperkuat kondisi kemiskinan yang persisten.

Di sisi lain, kemiskinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Studi Suryahadi et al. (2020) menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap layanan tersebut, yang pada akhirnya menghambat peningkatan kualitas hidup dan produktivitas mereka. Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus, di mana rendahnya pendapatan membatasi akses terhadap layanan dasar, dan keterbatasan akses tersebut kembali memperkuat kemiskinan.

Selain itu, kerentanan terhadap guncangan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan. Yusuf dan Sumner (2021) menegaskan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga pangan atau kehilangan pekerjaan. Tanpa adanya sistem perlindungan sosial yang memadai, guncangan tersebut dapat dengan cepat mendorong rumah tangga ke dalam kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kerentanan yang tinggi terhadap risiko ekonomi.

Lebih lanjut, hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila distribusi pendapatan tidak merata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dartanto et al. (2020) yang menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh tingkat ketimpangan

yang ada. Dengan kata lain, semakin tinggi ketimpangan, semakin kecil dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi inklusif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memerlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan. Pendekatan pembangunan inklusif menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Penelitian Nugraha dan Putri (2021) menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas, seperti peningkatan akses pendidikan dan program pemberdayaan ekonomi, mampu mengurangi ketimpangan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan memiliki peran yang signifikan sebagai determinan kemiskinan di Indonesia. Hubungan antara kedua variabel tersebut tidak bersifat sederhana, melainkan saling memengaruhi melalui berbagai mekanisme struktural, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, ketimpangan dalam pasar tenaga kerja, serta distribusi aset yang tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya merupakan dampak dari pembangunan yang belum merata, tetapi juga menjadi faktor yang mempertahankan kemiskinan dalam jangka panjang.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Peningkatan output ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan apabila distribusi hasil pembangunan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam konteks ini, tingkat kesenjangan pendapatan menjadi faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan, semakin terbatas dampak pertumbuhan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, struktur ketenagakerjaan, akses terhadap layanan dasar, serta kerentanan terhadap guncangan ekonomi memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan kondisi yang menghambat mobilitas ekonomi, sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi inklusif merupakan kerangka yang relevan dalam memahami dan mengatasi keterkaitan antara kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Pembangunan yang menekankan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem perlindungan sosial terbukti menjadi elemen penting dalam menekan ketimpangan sekaligus menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan pendapatan secara sistematis. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya integrasi antara strategi pertumbuhan dan pemerataan, sehingga pembangunan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprila, M. (2023). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736.
- Badriah, L. S. (2019). Ketimpangan distribusi pendapatan dan implikasinya terhadap kemiskinan. *Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage*, 9(1), 232-248.
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Revisiting Indonesian poverty dynamics: The role of social assistance and economic growth. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 293-318.
- Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K., & Kyngäs, H. (2019). Qualitative content analysis: A focus on trustworthiness. *SAGE Open*, 9(1), 1-10.
- Firmansyah, R. (2021). Struktur pasar tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145-158.
- Hutajulu, D. M., Septiani, Y., & Simamora, J. M. (2021). Analisis variabel sosial ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 108-120.
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Ketimpangan sosial ekonomi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 28-45.
- Jewaru, A., & Siagian, M. (2022). Determinan ketimpangan dan kemiskinan dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif. *Statistik Terapan*, 2(1), 71-86.
- Karimi, K., Mulyani, P., Murialti, N., & Tibrani, T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 107-116.
- Kurniawati, E., & Sari, D. P. (2022). Ketimpangan pendapatan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan regional. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(1), 67-80.
- Lestari, N. (2022). Efektivitas program perlindungan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(2), 101-115.
- Maulana, R. (2020). Analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(1), 55-70.
- Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2020). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology*, 20(1), 1-7.
- Nasution, D. (2020). Kebijakan fiskal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 24(2), 110-127.
- Nugraha, A., & Putri, R. (2021). Peran kebijakan inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 9(2), 89-104.
- Pratama, A., & Wibowo, H. (2021). Kemiskinan multidimensi dan implikasinya terhadap kebijakan publik. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 16(2), 134-149.
- Purnomo, D. (2022). Pembangunan ekonomi inklusif dan pengurangan ketimpangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 25-38.
- Putri, A. D., & Wahyudi, S. T. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 45-58.
- Rahman, F., & Hidayat, M. (2021). Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia: Analisis empiris. *Jurnal Ekonomi Modern*, 17(1), 77-92.

- Sari, M., & Nugroho, Y. (2023). Strategi pembangunan inklusif dalam menurunkan kemiskinan. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 11(1), 45-59.
- Setiawan, B., & Rizal, A. (2022). Distribusi pendapatan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Makro*, 5(2), 120-133.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). The impact of COVID-19 on poverty and inequality in Indonesia. *SMERU Research Institute Working Paper*, 1-15.
- Tambunan, T. (2016). *Pembangunan ekonomi inklusif: Sudah seberapa jauh Indonesia?* LP3ES.
- Wicaksono, E., & Amir, H. (2020). Ketimpangan dan pasar tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 211-225.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2021). Growth, poverty, and inequality under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 185-208.